

Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

I Kadek Surya Ade Wirawan^{1*}, I Nyoman Mahaendra Yasa²

¹⁻² Universitas Udayana, Indonesia

Penulis Korespondensi: suryaadewirawan@gmail.com

Abstract. *Income distribution inequality continues to be a significant socio-economic challenge in Bali Province, potentially limiting overall community welfare and sustainable development. This study investigates the impact of education level, labor force participation, district/city minimum wage, and government capital expenditure on income distribution inequality across 9 districts and cities in Bali Province over the period 2014–2024, using a total of 99 observations. Employing panel data regression analysis with the Random Effects Model, the results indicate that all four variables, both simultaneously and individually, have a negative and statistically significant effect on income distribution inequality. Specifically, higher education levels and increased labor force participation are associated with a reduction in inequality, while higher minimum wages and more efficient allocation of capital expenditure further contribute to narrowing income disparities. These findings are consistent with the Human Capital Theory and the Kuznets hypothesis, emphasizing the role of investment in human resources and economic policies in shaping equitable growth. The study provides actionable policy recommendations for the Bali Provincial Government, suggesting enhanced access to education, labor market optimization, strategic minimum wage adjustments, and targeted capital expenditure to effectively reduce income inequality in the region.*

Keywords: *Capital expenditure; Education level; Income distribution inequality; Labor force; Minimum wage*

Abstrak. Ketimpangan distribusi pendapatan terus menjadi tantangan sosial-ekonomi yang signifikan di Provinsi Bali, yang berpotensi membatasi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pembangunan berkelanjutan. Studi ini menyelidiki dampak tingkat pendidikan, partisipasi angkatan kerja, upah minimum kabupaten/kota, dan belanja modal pemerintah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di 9 kabupaten dan kota di Provinsi Bali selama periode 2014-2024, menggunakan total 99 observasi. Dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan Model Efek Acak, hasilnya menunjukkan bahwa keempat variabel, baik secara simultan maupun individual, memiliki efek negatif dan signifikan secara statistik terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Secara spesifik, tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan peningkatan partisipasi angkatan kerja dikaitkan dengan pengurangan ketimpangan, sementara upah minimum yang lebih tinggi dan alokasi belanja modal yang lebih efisien semakin berkontribusi pada penyempitan disparitas pendapatan. Temuan ini konsisten dengan Teori Modal Manusia dan hipotesis Kuznets, yang menekankan peran investasi dalam sumber daya manusia dan kebijakan ekonomi dalam membentuk pertumbuhan yang adil. Studi ini memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti bagi Pemerintah Provinsi Bali, yang menyarankan peningkatan akses ke pendidikan, optimalisasi pasar tenaga kerja, penyesuaian upah minimum yang strategis, dan belanja modal yang ditargetkan untuk secara efektif mengurangi ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut.

Kata kunci: Belanja modal; Ketimpangan distribusi pendapatan; Tenaga kerja; Tingkat pendidikan; Upah minimum

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) khususnya tujuan ke-10 “*Reduced Inequalities*”, masih menjadi tantangan besar di Indonesia, termasuk di Provinsi Bali. Meskipun perekonomian nasional menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, ketimpangan distribusi pendapatan masih tinggi sebagaimana tercermin dalam fluktuasi indeks rasio gini nasional maupun regional. Data Badan Pusat Statistik tahun 2014–2024 menunjukkan penurunan indeks rasio gini dari 0,414 poin pada tahun 2014 menjadi 0,380 poin

pada tahun 2019, kemudian kembali berfluktuasi akibat pandemi *COVID-19* sebelum turun ke 0,381 poin pada tahun 2024, dengan pola serupa terjadi di Provinsi Bali. Variasi ketimpangan antarwilayah di Provinsi Bali dipengaruhi oleh konsentrasi pembangunan di kawasan Bali selatan (Denpasar, Badung, Gianyar) yang menjadi pusat pariwisata, sementara wilayah Bali utara, timur, dan barat tertinggal dari sisi akses pendidikan, infrastruktur, dan kesempatan kerja. Indeks rasio gini Provinsi Bali pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,3611 poin, menempatkan Provinsi Bali pada kategori ketimpangan sedang namun tetap rentan terhadap guncangan eksternal. Faktor fundamental seperti tingkat pendidikan terbukti menjadi kunci dalam menekan ketimpangan pendapatan, sejalan dengan *Human Capital Theory* yang menekankan pendidikan sebagai investasi strategis untuk meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan pendapatan masyarakat. Penguatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, dan kebijakan pembangunan yang inklusif menjadi prioritas utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang lebih adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan data rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali tahun 2019 – 2024 menunjukkan tren peningkatan di seluruh kabupaten/kota. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 8,84 tahun pada 2019 menjadi 9,54 tahun pada 2024 mencerminkan kemajuan akses dan partisipasi pendidikan. Kota Denpasar dengan nilai RLS sebesar 11,53 tahun, Kabupaten Badung sebesar 11,14 tahun, dan Kabupaten Gianyar sebesar 9,84 tahun. Wilayah ini mencatat angka tertinggi, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduknya telah menyelesaikan pendidikan menengah pertama sampai menengah atas. Lulusan dari daerah yang lebih makmur cenderung mendapatkan pekerjaan profesional atau manajerial yang lebih baik dibandingkan lulusan dari daerah terpencil, karena dipengaruhi oleh perbedaan kekayaan dan pendapatan di wilayah asal (Yu *et al.*, 2024). Capaian ini didukung oleh kondisi sosial ekonomi yang lebih baik serta ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai.

Pada beberapa kabupaten lainnya seperti Kabupaten Karangasem dengan angka RLS sebesar 6,70 tahun, Kabupaten Bangli sebesar 7,58 tahun, dan Kabupaten Buleleng sebesar 7,69 tahun masih memiliki rata-rata lama sekolah yang rendah, mencerminkan adanya kesenjangan pendidikan antarwilayah di Provinsi Bali. Faktor penyebabnya antara lain keterbatasan infrastruktur, rendahnya pendapatan, dan kebutuhan ekonomi keluarga yang mendorong anak terlibat dalam pekerjaan (BPS Provinsi Bali, 2023). Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi pendidikan dan berpotensi memperbesar ketimpangan. Hal ini sejalan dengan *Human Capital Theory* Becker (1964:17) pendidikan merupakan investasi penting untuk meningkatkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi yang merata, dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

Ketimpangan pendapatan muncul karena kualitas tenaga kerja tidak merata, di mana pekerja berpendidikan rendah cenderung berada di sektor bergaji rendah (Sukirno, 2020:233). Menurut Mahendra dan Utomo (2023) bahwa jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar seharusnya dapat menjadi aset potensial untuk menggerakkan roda perekonomian, namun tanpa kualitas dan penyerapan yang memadai justru berpotensi menjadi beban pembangunan.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mencerminkan sejauh mana penduduk usia kerja benar-benar terlibat dalam kegiatan ekonomi. TPAK yang tinggi menunjukkan mobilisasi sumber daya manusia yang besar sehingga menjadi indikator penting dalam mengukur keterlibatan tenaga kerja. Namun, apabila peningkatan TPAK tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang produktif, hal ini dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi baru dan menambah tekanan pada pasar tenaga kerja (Sukirno, 2016:325).

Beberapa wilayah menunjukkan nilai TPAK yang berada dibawah nilai TPAK Provinsi Bali seperti Kota Denpasar sebesar 69,71 persen, Kabupaten Tabanan sebesar 75,29 persen, dan Kabupaten Badung 75,59 persen. Rendahnya angka ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingginya partisipasi dalam pendidikan tinggi yang menyebabkan sebagian usia kerja belum masuk ke pasar kerja, serta struktur ekonomi yang lebih tersentralisasi pada sektor formal dan jasa, di mana kualifikasi dan proses masuk kerja cenderung lebih selektif.

Penelitian Oktasari & Suradi (2025) menunjukkan bahwa peningkatan TPAK berkontribusi terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan meskipun dengan pengaruh terbatas. Namun, penelitian sebelumnya oleh Rosalitta & Muljaningsih (2020) serta Silalahi (2023) menunjukkan bahwa angkatan kerja termasuk jumlah penduduk yang bekerja berperan dalam menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Penerapan upah minimum merupakan salah satu instrumen kebijakan ketenagakerjaan yang bertujuan menjamin penghasilan layak bagi pekerja. Menurut teori upah dari Ricardo (1817:93), tingkat upah berada pada batas minimum yang diperlukan untuk mempertahankan hidup pekerja dan memastikan regenerasi tenaga kerja. Oleh karena itu penetapan upah minimum yang lebih tinggi dapat mempersempit ketimpangan distribusi pendapatan. Semakin tinggi upah minimum di suatu wilayah umumnya ketimpangan pendapatan cenderung lebih rendah. Hal ini sejalan dengan temuan Farhan dan Sugianto (2022) yang menunjukkan adanya peran upah minimum dalam menekan ketimpangan. Temuan serupa juga disampaikan oleh Wahyuni dan Purbadharmaja (2024), yang menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum turut berkontribusi dalam memperbaiki distribusi pendapatan.

Perbedaan upah minimum antar daerah dapat memperbesar ketimpangan dan mendorong migrasi tenaga kerja ke daerah dengan upah lebih tinggi, yang berpotensi menciptakan tekanan demografis dan sosial. Menurut Fields (2001:74) upah minimum dapat mengurangi ketimpangan jika meningkatkan pendapatan kelompok pekerja tanpa menghambat penciptaan lapangan pekerjaan. Namun, tanpa perluasan sektor pekerjaan formal, kebijakan ini dapat memperburuk ketimpangan sehingga perlunya penyesuaian upah minimum secara proporsional di setiap kabupaten/kota.

Berdasarkan data BPS Provinsi Bali tahun 2019 – 2024, terlihat adanya pola kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) secara konsisten di seluruh wilayah. Kenaikan ini mencerminkan penyesuaian terhadap inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang merepresentasikan daya beli dan produktivitas. UMK Provinsi Bali meningkat dari Rp 2.297.969 pada tahun 2019 menjadi Rp 2.813.672 pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Kota Denpasar dan Kabupaten Badung tercatat memiliki UMK tertinggi pada tahun 2024, masing-masing sebesar Rp 3.096.823 dan Rp 3.318.628 seiring dengan perannya sebagai pusat ekonomi, perdagangan, dan pariwisata dengan biaya hidup yang tinggi. Sebaliknya, daerah seperti Kabupaten Karangasem, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Bangli memiliki UMK yang lebih rendah dan relatif seragam sebesar Rp 2.813.672 karena struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer seperti pertanian dan perikanan, serta minimnya sektor industri dan jasa yang mampu membayar upah tinggi.

Perbedaan UMK ini mencerminkan ketidakmerataan ekonomi antarwilayah, di mana daerah dengan ekonomi lebih berkembang cenderung menetapkan upah lebih tinggi. Ketimpangan upah turut berkontribusi pada perbedaan tingkat kesejahteraan dan memperbesar ketimpangan pendapatan. Penetapan upah minimum mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja, pertumbuhan output, serta peningkatan aliran investasi di sektor industri sebagai respon terhadap permintaan yang ada (Olivia & Widanta, 2023).

Penelitian dari Julihanza & Khoirudin (2023) dan Mudana & Purbadharmaja (2024) menunjukkan bahwa upah minimum dapat menekan ketimpangan pendapatan. Namun, terdapat pula penelitian terdahulu dengan temuan berbeda yaitu Istikharoh & Destiningsih (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan upah minimum justru berperan dalam meningkatkan ketimpangan pendapatan meskipun dengan pengaruh yang terbatas.

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk pengadaan atau pembangunan aset tetap, seperti infrastruktur, yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan mendukung

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam kerangka belanja modal, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta fasilitas publik. Tersedianya fasilitas pelayanan publik yang memadai dapat meningkatkan aktivitas dan motivasi kerja masyarakat. Selain itu, fasilitas yang baik mampu menarik investasi di setiap daerah, yang selanjutnya mempercepat pembangunan ekonomi dan menurunkan tingkat ketimpangan (Anshari dkk. 2018).

Berdasarkan data realisasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2019–2024, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan di sebagian besar wilayah, terutama pada tahun 2020 hingga 2022 yang menunjukkan tren penurunan. Penurunan ini merupakan dampak dari pandemi *COVID-19* yang menyebabkan *refocusing* anggaran ke sektor kesehatan dan jaring pengaman sosial. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 realisasi belanja modal kembali meningkat di beberapa daerah sebagai bentuk pemulihan ekonomi dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Kabupaten Badung dan Kota Denpasar mencatatkan realisasi belanja modal tertinggi pada tahun 2024, masing-masing sebesar 907,53 dan 465,85 Miliar. Hal ini sejalan dengan posisi keduanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan aktivitas pariwisata dan jasa di Provinsi Bali. Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Klungkung memiliki belanja modal yang jauh lebih rendah. Kondisi ini mencerminkan perbedaan kapasitas fiskal antarwilayah, yang dipengaruhi oleh potensi pendapatan asli daerah (PAD) serta skala pembangunan yang dibutuhkan.

Penelitian Anshari dkk. (2018) dan Alfurqani dkk. (2021) menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal, seperti pengeluaran untuk infrastruktur dan fasilitas umum, berpotensi memperbesar ketimpangan distribusi pendapatan. Sementara itu, Musfetriyati (2019) menemukan bahwa alokasi belanja modal justru dapat membantu menurunkan ketimpangan pendapatan.

Kondisi ketimpangan distribusi pendapatan perlu mendapatkan perhatian dan segera ditangani karena memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas sosial dan ekonomi (Hababil dkk. 2024). Ketidakmerataan yang berlangsung secara berkepanjangan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti peningkatan angka kemiskinan di wilayah tertinggal, serta menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Bali sebagai upaya pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan wawasan empiris yang lebih mendalam mengenai hubungan antar variabel tersebut, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif yang bertujuan mengkaji sejauh mana tingkat pendidikan, angkatan kerja, upah minimum, dan belanja modal memengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pendekatan kuantitatif dipilih karena seluruh data disajikan dalam bentuk angka dan diolah melalui analisis statistik. Riset ini dikategorikan sebagai riset eksplanatori dengan penekanan pada pengujian keterkaitan antarvariabel untuk memperoleh kesimpulan yang valid berdasarkan data empiris. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan secara sistematis keterkaitan variabel independen dengan variabel dependen, yakni ketimpangan distribusi pendapatan (Sugiyono, 2017).

Lokasi penelitian ditetapkan pada delapan kabupaten dan satu kota madya di Provinsi Bali, yaitu Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Karangasem, Buleleng, Klungkung, dan Kota Denpasar. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada variasi nilai indeks rasio gini dari tahun 2014 hingga 2024 yang menunjukkan adanya perbedaan tingkat ketimpangan, mulai dari kategori rendah hingga sedang. Objek penelitian mencakup empat variabel independen, yaitu tingkat pendidikan, angkatan kerja, upah minimum, dan belanja modal, serta satu variabel dependen, yaitu ketimpangan distribusi pendapatan. Data penelitian yang digunakan merupakan data sekunder berupa *balanced panel* yang diperoleh dari sumber resmi, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Widarjono, 2013).

Teknik analisis data menggunakan regresi data panel dengan tiga pendekatan, yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Pemilihan model terbaik ditentukan melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Sebelum pengujian hipotesis, data terlebih dahulu diuji melalui uji asumsi klasik meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Pengujian hipotesis dilakukan baik secara simultan (uji F) maupun parsial (uji t), serta diperkuat dengan analisis koefisien beta standar untuk mengetahui variabel paling dominan berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Metode ini diharapkan menghasilkan estimasi yang robust dan mampu menggambarkan secara akurat dinamika distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Bali (Gujarati, 2020; Wooldridge, 2016).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Terhadap Data Penelitian

Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasil penelitian dapat diuraikan seperti berikut.

Hasil Analisis Model Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) (Priyatno, 2009:93). Estimasi regresi data panel dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM).

a. *Common Effect Model* (CEM)

Tabel 1. Hasil Estimasi Regresi Data Panel (*Common Effect Model*).

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 08/09/25 Time: 21:42

Sample: 2014 2024

Periods included: 11

Cross-sections included: 9

Total panel (balanced) observations: 99

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.456382	0.069736	6.544401	0.0000
X1	0.007153	0.002402	2.977436	0.0037
X2	-0.001131	0.000780	-1.450375	0.1503
X3	-3.98E-08	6.63E-09	-5.994501	0.0000
X4	-4.20E-07	1.21E-07	-3.467456	0.0008
R-squared	0.366658	Mean dependent var		0.325643
Adjusted R-squared	0.639707	S.D. dependent var		0.325643
S.E. of regression	0.025310	Akaike info criterion		-4.466078
Sum squared resid	0.062314	Schwarz criterion		-4.335011
Log likelihood	226.0709	Hannan-Quinn criter.		-4.413048
F-statistic	13.60476	Durbin-Watson stat		1.349999
Prob(F-statistic)	0.000000			

b. *Fixed Effect Model (FEM)*

Tabel 2. Hasil Estimasi Regresi Data Panel (*Fixed Effect Model*).

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 08/09/25 Time: 21:40

Sample: 2014 2024

Periods included: 11

Cross-sections included: 9

Total panel (balanced) observations: 99

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.503073	0.098365	5.114337	0.0000
X1	0.006520	0.004013	1.624833	0.0899
X2	-0.000702	0.000999	-0.702123	0.4845
X3	-2.80E-08	1.51E-08	-1.854802	0.0671
X4	-4.03E-07	1.85E-07	-2.177653	0.1075

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.428296	Mean dependent var	0.325643
Adjusted R-squared	0.562477	S.D. dependent var	0.031147
S.E. of regression	0.022836	Akaike info criterion	-4.599121
Sum squared resid	0.044847	Schwarz criterion	-4.258348
Log likelihood	240.6655	Hannan-Quinn criter.	-4.461244
F-statistic	8.026485	Durbin-Watson stat	1.757561
Prob(F-statistic)	0.000000		

c. *Random Effect Model (REM)*

Tabel 3. Hasil Estimasi Regresi Data Panel (*Random Effect Model*).

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 08/09/25 Time: 21:43

Sample: 2014 2024

Periods included: 11

Cross-sections included: 9

Total panel (balanced) observations: 99

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.456241	0.078293	5.827322	0.0000
X1	-0.005659	0.014135	-0.400384	0.0322
X2	-0.001065	0.000871	-1.221991	0.0210
X3	-3.98E-08	7.03E-09	-5.665249	0.0000
X4	-4.02E-07	1.60E-07	-2.508959	0.0138

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.015088	0.3039
Idiosyncratic random	0.022836	0.6961

Weighted Statistics

R-squared	0.539574	Mean dependent var	0.135192
Adjusted R-squared	0.731471	S.D. dependent var	0.027189
S.E. of regression	0.022561	Sum squared resid	0.047845
F-statistic	12.08309	Durbin-Watson stat	1.978350
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

Statistik	Nilai	Statistik	Nilai
R-squared	0.365368	Mean dependent var	0.325643
Sum squared resid	0.060037	Durbin-Watson stat	1.342126

Hasil Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

a. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model regresi data panel yang tepat, antara *fixed effect model* atau *common effect model*. Berikut ini merupakan kriteria yang digunakan untuk mengambil kesimpulan pada Uji Chow

- 1) Jika nilai probability *cross-section chi-square* $> 0,05$, maka H_0 diterima, sehingga model yang digunakan adalah *common effect model*.
- 2) Jika nilai probability *cross-section chi-square* $< 0,05$ maka H_0 ditolak, sehingga model yang digunakan adalah *fixed effect model*.

Hasil uji chow yang diperoleh setelah melakukan pengolahan data adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Chow.

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FEM

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.683689	(8,86)	0.0010
Cross-section Chi-square	29.171266	8	0.0003

Sumber : Data diolah penulis

Berdasarkan hasil Uji Chow di atas, dapat dilihat bahwa nilai *probability cross section chi-square* adalah $0.0003 < 0,05$, ini berarti H_0 ditolak dan model terbaik yang digunakan adalah *fixed effect model* (FEM).

b. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan apakah analisis data panel menggunakan *fixed effect model* atau *random effect model*. Kriteria yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan Uji Hausman adalah sebagai berikut.

- 1) Jika nilai *probability cross section random* $> 0,05$, maka H_0 diterima, sehingga model yang digunakan adalah *random effect model*.
- 2) Jika nilai *probability cross section random* $< 0,05$, maka H_0 ditolak, sehingga model yang digunakan adalah *fixed effect model*.

Hasil Uji Hausman yang diperoleh setelah melakukan pengolahan data adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Hausman.

Correlated Random Effects – Hausman Test

Equation: REM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.750137	4	0.7816

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan hasil Uji Hausman di atas, dapat dilihat bahwa nilai *probability cross section* adalah $0.7816 > 0,05$ artinya H_0 diterima; maka *random effect model* yang digunakan.

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk menentukan model regresi data panel yang tepat antara *common effect model* dan *random effect model*, dengan kriteria sebagai berikut.

- 1) Jika nilai *cross section* Breusch-pagan $\geq 0,05$, maka H_0 diterima, sehingga *common effect model* yang digunakan.
- 2) Jika nilai *cross section* Breusch-pagan $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak, sehingga *random effect model* yang digunakan.

Tabel 6. Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM).

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Cross-section	Test Hypotesis	
		Time	Both
Breusch-Pagan	14.68774	0.349530	15.03727
(<i>p-value</i>)	(0.0001)	(0.5544)	(0.0001)

Sumber : Data terlampir pada skripsi penulis

Berdasarkan hasil Uji Lagrange Multiplier (LM) di atas, dapat dilihat bahwa nilai *cross section* adalah $0.0001 < 0,05$, ini berarti H_0 ditolak dan model terbaik yang digunakan adalah *random effect model* (REM).

Dari hasil Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM) yang telah dilakukan, *Random Effect Model* (REM) terpilih menjadi model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini. Hasil estimasi pada Tabel 3 dimasukkan ke dalam persamaan regresi data panel, maka diperoleh persamaan sebagai berikut.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

$$Y_{it} = 0,4562241 + (-0,005659) + (-0,001065) + (0,0000000398) + (-0,000000402)$$

Keterangan:

Y = Ketimpangan Distribusi Pendapatan

X₁ = Tingkat Pendidikan

X₂ = Angkatan Kerja

X₃ = Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

X₄ = Belanja Modal

β_0 = Konstanta/Koefisien

e = Error

i = 1,2,3.....9 (*Crosssection unit*)

t = 1,2,3.....11 (*Time series*)

Berdasarkan hasil estimasi regresi dengan *Random Effect Model* (REM), dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

- 1) Konstanta ($C = 0,456$), menyatakan bahwa jika seluruh variabel bebas (X_1 , X_2 , dan X_3) dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai ketimpangan distribusi pendapatan (Y) secara rata-rata berada di angka 0,456 poin. Nilai ini merupakan rata-rata awal ketimpangan distribusi pendapatan tanpa dipengaruhi oleh variabel bebas.
- 2) Koefisien X_1 sebesar $(-0,006)$, menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu tahun pada rata-rata lama sekolah akan menurunkan indeks ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0,006 poin dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- 3) Koefisien X_2 sebesar $(-0,001)$, menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu persen pada jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja akan menurunkan indeks ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0,001 poin dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- 4) Koefisien X_3 sebesar $(-0,0000000398)$, menunjukkan bahwa setiap kenaikan Rp1 pada Upah minimum Kabupaten/Kota akan menurunkan indeks ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0,0000000398 poin dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- 5) Koefisien X_4 sebesar $(-0,000000402)$, menunjukkan bahwa setiap kenaikan Rp1 miliar pada belanja modal akan menurunkan indeks ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0,000000402 poin dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Uji Asumsi Klasik

Analisis regresi memerlukan pemenuhan sejumlah asumsi dasar agar model yang dibangun dapat berfungsi secara optimal sebagai alat prediksi. Untuk menghasilkan estimasi regresi yang bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), model tersebut harus memenuhi asumsi-asumsi klasik. Pengujian terhadap asumsi klasik mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel residual memiliki distribusi normal atau tidak dalam model regresi. Uji asumsi normalitas dalam penelitian ini

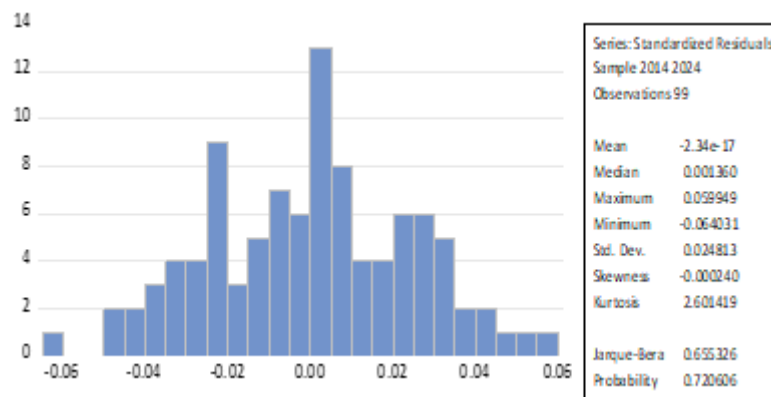
menggunakan uji *Jarque-Bera* (JB Test). Pengujian ini didasarkan pada koefisien keruncingan (kurtosis) dan koefisien kemiringan (*skewness*). Adapun hipotesis dalam uji JB yakni sebagai:

H0 : residual berdistribusi normal

H1 : residual tidak berdistribusi normal

Apabila probabilitas $JB > 0,05$, H0 diterima yang artinya residual berdistribusi normal. Namun, apabila probabilitas $JB < 0,05$, H0 ditolak yang berarti residual tidak berdistribusi normal.

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa nilai uji Jarque-Bera (JB Test) sebesar 1.4585 yang berarti nilai ini lebih besar dari 0,05. Sehingga H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa residual tersebut berdistribusi normal.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas.

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Gambar 1 diatas, terlihat bahwa nilai *Probability* (0.7206) $> 0,05$ atau lebih besar dari α (5%), Maka H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa residual tersebut berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas merupakan suatu uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi tersebut terdapat korelasi dengan variabel bebas. Model regresi yang ideal adalah model di mana antar variabel independennya tidak saling berkorelasi. Jika suatu model mengandung gejala multikolinearitas namun tetap digunakan, maka hasil prediksi yang dihasilkan berpotensi menyimpang dari kenyataan. Untuk mendeteksi adanya hubungan antar variabel bebas tersebut, dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika VIF kurang dari 10 maka tidak terdapat multikolinearitas pada variabel sehingga layak untuk diuji lebih lanjut.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas.

Variance Inflation Factors

Date: 08/09/25 Time: 21:54

Sample: 1 99

Included observations: 99

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.005053	736.9583	NA
X1	5.96E-06	62.60591	2.249522
X2	6.29E-07	542.9316	1.780335
X3	4.63E-17	37.64403	1.373934
X4	2.58E-10	3.539894	1.236030

Sumber : Data diolah penulis

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 7 diatas variabel tingkat pendidikan (X1) memiliki nilai VIF sebesar 2,249, variabel angkatan kerja (X2) memiliki nilai VIF sebesar 1,780, variabel upah minimum kabupaten/kota (X3) memiliki nilai VIF sebesar 1,373, dan variabel belanja modal (X4) memiliki nilai VIF sebesar 1,236. Dikarenakan semua variabel independen memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terdapat multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah varian residual berbeda antaraobservasi dalam suatu model regresi. Dalam penelitian ini, uji yang dipilih adalah Glejser test, yang dilakukan dengan meregresikan variabel independen terhadap nilai absolut residual dari model regresi.

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas.

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 08/09/25 Time: 21:55

Sample: 1 99

Included observations: 99

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.102228	0.040105	2.549006	0.0125
X1	-0.001651	0.001377	-1.198486	0.2338
X2	-0.000774	0.000447	-1.730165	0.0870
X3	-2.51E-09	3.84E-09	-0.653418	0.5151
X4	-1.19E-05	9.06E-06	-1.313719	0.1922

Sumber : Data diolah penulis

Dari hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas untuk variabel tingkat pendidikan yaitu 0,233, angkatan kerja yaitu 0,087, upah minimum kabupaten/kota yaitu 0,515, dan belanja modal yaitu 0,192. Seluruh variabel independen memiliki nilai probabilitas di atas 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel dependen yang digunakan tidak memiliki masalah heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$) dalam model regresi linear. Fenomena autokorelasi biasanya muncul karena observasi yang berurutan dalam waktu saling berkaitan (Ghozali, 2013).

Pengujian autokorelasi dapat dilakukan menggunakan Durbin-Watson (DW) test. Uji ini khusus untuk mendeteksi autokorelasi tingkat pertama (*first-order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi, serta tidak ada variabel tambahan di antara variabel eksogen.

Tabel 9. Hasil Uji Autokorelasi.

R-squared	0.539574	Mean dependent var	0.135192
Adjusted R-squared	0.731471	S.D. dependent var	0.027189
S.E. of regression	0.022561	Sum squared resid	0.047845
F-statistic	12.08309	Durbin-Watson stat	1.978350
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah penulis

Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin Watson yang disajikan pada Tabel 9, menunjukkan nilai DW sebesar 1,978350, dengan nilai dL sebesar 1,5897 dan nilai dU sebesar 1,7575.

Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, nilai DW berada diantara nilai dU dan $4-dU$ yaitu $1,7575 < 1,9783 < 2,4103$ ($dU < DW < 4-dU$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi.

Uji Statistik

Analisis uji statistik bertujuan untuk menilai kelayakan model regresi dan menguji apakah masing-masing koefisien regresi signifikan secara statistik serta sesuai dengan arah yang diduga dalam teori atau hipotesis. Pengujian ini meliputi uji F (untuk melihat pengaruh simultan) dan uji t (untuk melihat pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen).

Uji Signifikansi Model (Uji F-Statistik)

Tabel 10. Hasil Signifikansi Model (Uji F-Statistik).

Dependent Variable: Y				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 08/09/25 Time: 21:43				
Sample: 2014 2024				
Periods included: 11				
Cross-sections included: 9				
Total panel (balanced) observations: 99				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.456241	0.078293	5.827322	0.0000
X1	-0.005659	0.014135	-0.400384	0.0322
X2	-0.001065	0.000871	-1.221991	0.0210
X3	-3.98E-08	7.03E-09	-5.665249	0.0000
X4	-4.02E-07	1.60E-07	-2.508959	0.0138
Effects Specification				
		S.D.	Rho	
Cross-section random		0.015088	0.3039	
Idiosyncratic random		0.022836	0.6961	
Weighted Statistics				
R-squared	0.539574	Mean dependent var		0.135192
Adjusted R-squared	0.731471	S.D. dependent var		0.027189
S.E. of regression	0.022561	Sum squared resid		0.047845
F-statistic	12.08309	Durbin-Watson		1.978350
Prob(F-statistic)	0.000000	stat		
Unweighted Statistics				
R-squared	0.365368	Mean dependent var		0.325643
Sum squared resid	0.060337	Durbin-Watson		1.342126
		stat		

Sumber : Data diolah penulis

Berdasarkan hasil uji di atas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas *F- statistic* lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($0,0000 < 0,05$) dan F hitung sebesar $12,083 > F$ tabel 2,46 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil pengujian sesuai dengan

hipotesis pertama, yaitu variabel Tingkat Pendidikan, Angkatan Kerja, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Belanja Modal secara bersama-sama menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji Signifikansi Parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu tingkat pendidikan, angkatan kerja, upah minimum kabupaten/kota, dan belanja modal secara terpisah terhadap variabel dependen yaitu ketimpangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Bali secara parsial. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah koefisien regresi setiap variabel independen signifikan secara statistik serta untuk mengetahui arah pengaruhnya secara positif atau negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hasil uji t dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil Signifikansi Parsial (Uji t).

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 08/09/25 Time: 21:43

Sample: 2014 2024

Periods included: 11

Cross-sections included: 9

Total panel (balanced) observations: 99

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.456241	0.078293	5.827322	0.0000
X1	-0.005659	0.014135	-0.400384	0.0322
X2	-0.001065	0.000871	-1.221991	0.0210
X3	-3.98E-08	7.03E-09	-5.665249	0.0000
X4	-4.02E-07	1.60E-07	-2.508959	0.0138
Effects Specification				
		S.D.		Rho
	Cross-section random	0.015088		0.3039
	Idiosyncratic random	0.022836		0.6961
Weighted Statistics				
R-squared	0.539574	Mean dependent var		0.135192
Adjusted R-squared	0.731471	S.D. dependent var		0.027189
S.E. of regression	0.022561	Sum squared resid		0.047845

F-statistic	12.08309	Durbin-Watson stat	1.978350
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
Statistic	Nilai	Statistic	Nilai
R-squared	0.365368	Mean dependent var	0.325643
Sum squared resid	0.060337	Durbin-Watson stat	1.342126

Sumber: Data diolah penulis

Analisis signifikansi masing-masing variabel independen dilakukan berdasarkan nilai probabilitas (*p-value*) dari uji t, sementara arah hubungan diamati melalui nilai t-hitung dan tanda koefisien regresi.

- Variabel tingkat pendidikan (X1) memiliki nilai t-hitung sebesar -0,400 dan memiliki nilai probabilitas sebesar $0,032 < 0,05$ yang menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali (Y).
- Variabel angkatan kerja (X2) memiliki nilai t-hitung sebesar -1.221 dan memiliki nilai probabilitas sebesar $0,021 < 0,05$ yang menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali (Y).
- Variabel upah minimum kabupaten/kota (X3) memiliki t-hitung sebesar -5,665 dan memiliki nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali (Y).
- Variabel belanja modal (X4) memiliki t-hitung sebesar -2,508 dan memiliki nilai probabilitas sebesar $0,013 < 0,05$ yang menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali (Y).

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada dalam rentang antara 0 hingga 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Berdasarkan Tabel 12 diketahui bahwa nilai *Adjusted R-squared* pada model estimasi adalah sebesar 0,7314. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan, angkatan kerja, upah minimum kabupaten/kota, dan belanja modal secara bersama-sama mampu menjelaskan 73,14 persen variasi ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Sementara itu 26,86 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

Tabel 12. Nilai Koefisien Determinasi (R^2).

R-squared	0.539574	Mean dependent var	0.135192
Adjusted R-squared	0.731471	S.D. dependent var	0.027189
S.E. of regression	0.022561	Sum squared resid	0.047845
F-statistic	12.08309	Durbin-Watson stat	1.978350
Prob (F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah penulis

Analisis Standardized Coefficient Beta

Tabel 13. Hasil Analisis *Standardized Coefficient Beta*.

<i>Variable</i>	<i>Coefficients unstandardized</i>	<i>Standar Deviasi</i>
Y	0.456382132	0.031147104
X1	-0.007153075	1.628473852
X2	-0.001130956	4.446510937
X3	-3.98104E-08	454925.4163
X4	-4.19502E-07	23856.68421

Sumber: (Data diolah), 2025

Perhitungan koefisien beta standar masing-masing variabel menggunakan rumus sebagai berikut:

$$1) \text{ Tingkat Pendidikan } (\beta'_1) = \beta_i \times \frac{(SD_{X_i})}{(SD_Y)} = -0.007153075 \times (1.6284/0,0311) \\ = -0.374$$

$$2) \text{ Angkatan Kerja } (\beta'_2) = \beta_i \times \frac{(SD_{X_i})}{(SD_Y)} = -0.001130956 \times (4.446/0,0311) \\ = -0,161$$

$$3) \text{ UMK } (\beta'_3) = \beta_i \times \frac{(SD_{X_i})}{(SD_Y)} = -3.98104E-08 \times (454925.4163/0,0311) \\ = -0.582$$

$$4) \text{ Belanja Modal } (\beta'_4) = \beta_i \times \frac{(SD_{X_i})}{(SD_Y)} = -4.19502E-07 \times (23856.68421/0,0311) \\ = -0,321$$

Berdasarkan nilai hasil perhitungan *Standardized Coefficient Beta*, variabel yang berpengaruh dominan ditentukan dari nilai koefisien beta yang paling besar. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel angkatan kerja (X_2) memiliki nilai koefisien beta tertinggi di bandingkan variabel lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel angkatan kerja memiliki pengaruh paling dominan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil analisis data panel dengan pendekatan REM menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, angkatan kerja, upah minimum kabupaten/kota, dan belanja modal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia, kebijakan upah minimum, serta peran belanja modal pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam menciptakan pemerataan ekonomi antarwilayah.

Secara parsial, keempat variabel terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Pendidikan sebagai investasi modal manusia mampu meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, sehingga memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kesenjangan. Angkatan kerja yang terserap secara optimal mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Di sisi lain, penetapan upah minimum yang layak memperbaiki daya beli kelompok berpendapatan rendah, sementara alokasi belanja modal yang tepat sasaran menghasilkan efek pengganda bagi pembangunan daerah. Temuan ini sejalan dengan *Human Capital Theory*, teori upah Ricardo, teori Keynes dan hipotesis Kuznets mengenai pemerataan pembangunan.

Di antara variabel yang diteliti, angkatan kerja memiliki pengaruh paling dominan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Tingkat partisipasi tenaga kerja produktif menentukan pola distribusi pendapatan antarwilayah, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia disertai penyerapan tenaga kerja yang efektif menjadi kunci dalam menekan ketimpangan. Hasil ini memberikan implikasi bahwa strategi pembangunan di Provinsi Bali perlu diarahkan pada peningkatan pendidikan, kebijakan upah yang adil, serta belanja modal yang inklusif, guna menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti bahas mengenai Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut.

Variabel tingkat pendidikan, angkatan kerja, upah minimum kabupaten/kota, dan belanja modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali selama periode 2014 hingga 2024. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan secara substansial. Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,7314 menunjukkan bahwa 73,14 persen. Variasi ketimpangan distribusi pendapatan

kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat dijelaskan melalui variabel tingkat pendidikan, angkatan kerja, upah minimum kabupaten/kota, dan belanja modal. Sementara itu, sisanya sebesar 26,86 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

Variabel tingkat pendidikan, angkatan kerja, upah minimum kabupaten/kota, dan belanja modal secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali selama periode 2014 hingga 2024. Variabel dengan pengaruh paling dominan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali yaitu variabel Angkatan Kerja. Secara umum peran dan peningkatan pada masing-masing variabel tersebut cenderung menurunkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Temuan ini menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan partisipasi tenaga kerja, penetapan upah minimum yang efektif, dan optimalisasi belanja modal pemerintah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

DAFTAR REFERENSI

- Alfurqani, Z. H., Widiarsih, D., & Algusri, J. (2021). Pengaruh dana alokasi umum, belanja modal dan investasi terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Riau. *ECOUNTBIS: Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 295-307.
- Anshari, M., Azhar, Z., & Ariusni, A. (2018). Analisis pengaruh pendidikan, upah minimum provinsi dan belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Indonesia. *Jurnal Ecogen*, 1(3), 494. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v1i3.4990>
- Aprenisia, S. I., & Arka, S. (2021). The effect of private investment and capital expenditure on economic growth and income inequality in Bali Province. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(6), 262-267.
- Arafah, M., & Khoirudin, R. (2022). Analisis ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 628-636. <https://doi.org/10.20527/jiep.v5i2.6408>
- Arsyad, L. (2015). *Ekonomi pembangunan* (Edisi ke-5). Yogyakarta: UPP STIM.
- Ashari, N. R., Azis, M., & Wahyudi, D. (2024). Pengaruh pendidikan, kemiskinan dan pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 13(1), 1-10. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v13i2.25139>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2025). Denpasar: BPS Provinsi Bali.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Indonesia 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Indonesia 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. Chicago: University of Chicago Press.
- Danim, S. (2003). *Pengembangan sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Farhan, M., & Sugianto, S. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 243-258. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.29>
- Febriana, I. S., & Praptoyo, S. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal pada Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(9), 24-38.
- Istikharoh, P. J., & Destiningsih, R. (2020). Analisis pengaruh tingkat pendidikan, upah minimum dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008 - 2018. *Journal of Economic*, 7(3), 500-512.
- Jhingan, M. L. (2016). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan* (edisi ke-16). Jakarta: Rajawali Pers.
- Julihanza, A., & Khoirudin, R. (2023). Determinan ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(2), 1-12. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i2.93>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Audited 2029*. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta.
- Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jakarta.
- Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. (2021). *Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan*. Jakarta.
- Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja*. Jakarta.
- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest and money*. London: Macmillan.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kuznets, S. (2015). *Economic growth and income inequality*. New Jersey: Transaction Publishers.
- Mahendra, D. B., & Utomo, Y. P. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2017-2021. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 329-342.

- Mankiw, N. G. (2014). *Prinsip-prinsip ekonomi* (edisi ke-7). Stamford: Cengage Learning.
- Mose, N. (2025). Impact of education on income inequality in Kenya. *International Journal of Business and Applied Economics*, 4(2), 899–910. <https://doi.org/10.55927/ijbae.v4i2.68>
- Mudana, I. W. E., & Purbadharma, I. B. P. (2024). Pengaruh upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 9601–9612.
- Musfetriyati, W. (2019). Pengaruh fluktuasi harga minyak dunia, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2(7), 400–412. <https://doi.org/10.24036/jkep.v2i4.10387>
- Nilasari, A., & Amelia, R. (2022). Pengaruh PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation*, 2(2), 169–182.
- Oktasari, H., & Suradi, R. (2025). Pengaruh upah minimum, investasi, tingkat partisipasi angkatan kerja dan rata-rata lama sekolah terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat. *MSDJ: Management Sustainable Development Journal*, 7(1), 87–103.
- Olivia, S. Y., & Widanta, P. B. A. A. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten/kota, dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(6), 1186–1195. <https://doi.org/10.24843/EEB.2023.v12.i06.p16>
- Park, K. H. (2017). *Education, globalization, and income inequality in Asia* (ADB Working Paper No. 732). Asian Development Bank Institute.
- Pemerintah Provinsi Bali. (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Bali Tahun 2022*. Pemerintah Provinsi Bali.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan Indikator Ketenagakerjaan*. Jakarta.
- Prawoto, N. (2019). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Putri, A. S., & Anggraini, S. (2024). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Kota Tanjungpinang. *Manajerial dan Bisnis Tanjungpinang*, 7(2), 100–109. <https://doi.org/10.52624/manajerial.v7i2.2438>
- Putri, N. P. V. S., & Natha, I. K. S. (2014). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(1), 41–49.
- Rastogi, P. N. (2002). *Mengelola Kreativitas untuk Keunggulan Perusahaan* (hlm. 45). New Delhi: Macmillan India Ltd.
- Ricardo, D. (1817). *On the Principles of Political Economy and Taxation*. London: John Murray.

- Rosalitta, D., & Muljaningsih, S. (2022). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, angkatan kerja, dan perpajakan terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(2), 116–125.
- Salsabil, K. Z., Floresti, D. A., Istiqomah, & Suparjito. (2025). The influence of HDI, MSMEs, social expenditure, capital expenditure, and workforce on income inequality in Magelang City. *International Conference on Sustainable Economics, Management, and Accounting (ICSEMA 2025) Proceedings*, 01(01), 2339–. <https://doi.org/10.32424/icsema.1.1.156>
- Sanjaya, I. G. A., & Saskara, I. A. N. (2022). Pengaruh upah minimum dan investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan, Universitas Udayana*, 10(12), 4705–4737.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (4)*. Jakarta.
- Silalahi, R. (2023). Pengaruh jumlah penduduk yang bekerja dan investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 1325–1340. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2549>
- Simanjuntak, P. E. (1998). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Fakultas Penerbit Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabet.
- Sukirno, S. (2004). *Pengantar Teori Makro Ekonomi* (Edisi ke-3). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2006). *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi Teori Pengantar* (Edisi ke-3). Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukirno, S. (2020). *Makroekonomi Teori Pengantar* (Edisi revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (Edisi ke-9, diterjemahkan oleh Haris Munandar). Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development* (11th ed.). Boston: Addison Wesley.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development* (11th ed.). Boston: Addison Wesley.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Boston: Pearson Education.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 ayat (1)*. Jakarta.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 ayat (1)*. Jakarta.
- Utama, M. (2012). *Aplikasi Analisis Kuantitatif* (Edisi kelima). Bali: Universitas Udayana.
- Utama, M. (2012). *Aplikasi Analisis Kuantitatif* (Edisi kelima). Bali: Universitas Udayana.
- Wahyuni, S. K. N., & Purbadharmaja, P. B. I. (2024). Analisis disparitas pendapatan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. *Journal of Business Finance and Economic (JBFE)*, 5(2), 10–30. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5701>

- Wahyuni, S. K. N., & Purbadharmaja, P. B. I. (2024). Analisis disparitas pendapatan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. *Journal of Business Finance and Economic (JBFE)*, 5(2), 10–30. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5701>
- Waskito, W., Zuhrotun, Z., & Rusherlisyani, R. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal (Studi pada pemerintah kabupaten & pemerintah kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220–238. <https://doi.org/10.18196/rab.030247>
- Waskito, W., Zuhrotun, Z., & Rusherlisyani, R. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal (Studi pada pemerintah kabupaten & pemerintah kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220–238. <https://doi.org/10.18196/rab.030247>
- Wati, A. N. C., & Yasa, I. N. M. (2024). Determinan disparitas distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 7239–7254.
- Wati, A. N. C., & Yasa, I. N. M. (2024). Determinan disparitas distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 7239–7254.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika: Teori dan aplikasi untuk ekonomi dan bisnis* (Edisi ke-2). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika: Teori dan aplikasi untuk ekonomi dan bisnis* (Edisi ke-2). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wijayanti, N. N. A., Ratih, A., Usman, M., Aida, N., & Ciptawaty, U. (2023). Analisis pengaruh investasi, angkatan kerja, dan teknologi informasi dan komunikasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia periode tahun 2018–2021. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 245–265.
- Wijayanti, N. N. A., Ratih, A., Usman, M., Aida, N., & Ciptawaty, U. (2023). Analisis pengaruh investasi, angkatan kerja, dan teknologi informasi dan komunikasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia periode tahun 2018–2021. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 245–265.
- Wooldridge, J. M. (2016). *Introductory econometrics: A modern approach* (6th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Wooldridge, J. M. (2016). *Introductory econometrics: A modern approach* (6th ed.). Boston: Cengage Learning.
- World Bank. (2020). *World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains*. Washington, DC: World Bank Group.
- World Bank. (2020). *World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains*. Washington, DC: World Bank Group.
- Yu, Y., Gamsu, S., & Forsberg, H. (2024). 'Levelling up' social mobility? Comparing the social and spatial mobility for university graduates across districts of Britain. *The British Journal of Sociology*, 75(4), 379–399. <https://doi.org/10.1111/1468-4446.13089>

- Yu, Y., Gamsu, S., & Forsberg, H. (2024). 'Levelling up' social mobility? Comparing the social and spatial mobility for university graduates across districts of Britain. *The British Journal of Sociology*, 75(4), 379–399. <https://doi.org/10.1111/1468-4446.13089>
- Yunita, R., Gunarto, T., Marselina, M., & Yuliawan, D. (2023). The influence of GDP per capita, income inequality, and population on CO2 emission (Environmental Kuznet Curve Analysis in Indonesia). *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL)*, 2(2), 217–230. <https://doi.org/10.54443/sj.v2i2.130>
- Yunita, R., Gunarto, T., Marselina, M., & Yuliawan, D. (2023). The influence of GDP per capita, income inequality, and population on CO2 emission (Environmental Kuznet Curve Analysis in Indonesia). *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL)*, 2(2), 217–230. <https://doi.org/10.54443/sj.v2i2.130>